

Polisi Tembak Polisi

Diduga Berkaitan Beking Tambang Ilegal

Solok, MIMBAR - Kapolda Sumatera Barat Iren Suharyono mengatakan ada dugaan beking tambang ilegal dalam kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan.

Suharyono mengatakan Polres Solok Selatan sedang menangani kasus tambang ilegal galian C. Penembakan terjadi saat kepolisian hendak melakukan tindakan hukum.

"Sebelum peristiwa terjadi, salah satu anggota Polres sedang melakukan pendekatan hukum terhadap pekerjaan tambang diduga ilegal jenisnya galian C, di Solok Selatan. Saat pelaksanaan, tanpa diduga seorang perwira yang juga sebagai tersangka, oknum anggota kami pada posisi kontra pada penegakan hukum," kata Suharyono

dalam jumpa pers, Jumat (22/11).

Dia mengatakan AKP URA yang menjadi korban penembakan memang terus mendalami dugaan tambang ilegal. Suharyono pun sudah memberi apresiasi beberapa kali secara langsung atas penindakan yang dilakukan URA dan tim.

Suharyono mengaku tak menyangka ada anggotanya yang menentang langkah URA dan tim hingga tega menghabisi rekan sesama polisi.

■ Bersambung ke Hal 7



Dipecat dan Diproses Pidana

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait kasus penembakan yang dilakukan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar (37) kepada Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Riyanto Ulil Anshar. Jenderal Sigit

■ Bersambung ke Hal 7

Pilkada Rabu 27 November 2024

Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional

Jakarta, MIMBAR - Pemerintah resmi mengumumkan hari libur nasional pada hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024

■ Bersambung ke Hal 7

Jadwal Salat

18 SAFAR 1446 H

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Subuh : 04:54 WIB | Maghrib : 18:38 WIB |
| Zuhur : 12:28 WIB | Isya : 19:54 WIB |
| Ashar : 15:55 WIB | ■ Untuk kota Medan sekitarnya |

Renungan

Kejahatan Penegak Hukum

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Fenomena oknum penegak hukum yang membeking tindak kejahatan adalah masalah serius yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjadi penjaga keadilan dan keamanan. Oknum penegak hukum terlibat membeking kejahatan sejatinya mengkhianati sumpah dan tanggung jawab mereka untuk melindungi masyarakat. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai moral dan etika profesi.

Ketika aparat hukum terlibat dalam kejahatan, masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap sistem hukum dan keadilan. Hal ini dapat memicu sikap apatis

■ Bersambung ke Hal 7



Gibran Minta PPDB Zonasi Dihapus

Jakarta, MIMBAR - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem PPDB Zonasi segera dihapus. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan tanggapannya.

Seperti diketahui, zonasi merupakan salah satu sistem seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem ini awalnya bertujuan untuk menciptakan pemerataan kualitas dan akses sekolah dan pendidikan.

Tapi setelah 7 tahun berjalan, sistem PPDB Zonasi masih berkuat dengan masalah yang sama yakni tidak meratanya sebaran sekolah negeri di wilayah Indonesia. Bahkan maraknya manipulasi Kartu Keluarga demi sekolah favorit hingga adanya praktik pungli dan intervensi.

Melihat permasalahan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem zonasi dihilangkan. Gibran menyebut arahan itu sudah disampaikan secara langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para-para kepala dinas pendidikan itu saya sampaikan secara tegas ke pak menteri pendidikan. Pak, ini zonasi harus dihilangkan," kata Gibran dalam sambutannya di acara Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah dikutip dari tayangan YouTube Wapres RI, Jumat (22/11).

■ Bersambung ke Hal 7



Komisi III DPR RI Turun Tangan

PERISTIWA polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, pada Jumat dini hari, 22 November 2024, menyita perhatian Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Kami Komisi III DPR RI hari Senin akan ke Sumatera Barat, nanti beberapa anggota yang akan ke sana," kata Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman dalam konferensi pers di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).

Habiburrokhman menyebut, dia kemungkinan akan memimpin langsung kunjungan tersebut. Bila berhalangan, dia mengatakan akan mengutus setidaknya

■ Bersambung ke Hal 7



Daftar Negara-Negara yang Siap Tangkap Netanyahu

Medan, MIMBAR - Sejumlah negara menyatakan menghormati putusan Mahkamah Pidana Internasional atas surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant. Secara prinsipil, negara-negara ini juga menyatakan patuh dengan kewajiban merujuk Statuta Roma.

Sejauh ini, pemerintah-pemerintah Eropa mendukung ICC. Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, menyatakan bahwa keputusan tersebut "tidak bersifat politis" dan harus dihormati.

■ Bersambung ke Hal 7



■ Berebut setoran ...

■ He..he..he..



Respon Netanyahu Usai ICC Keluarkan Surat Penangkapan

PENGADILAN Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) membuat langkah mengejutkan. Secara resmi, lembaga tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terkait perangnya di Gaza, Palestina.

Ia disebut telah melakukan "kejahatan perang" dan "kejahatan kemanusiaan". Surat penangkapan ICC juga dikeluarkan untuk mantan menteri pertahanan Israel, Yoav Gallant dan

■ Bersambung ke Hal 7